

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA
KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

OLEH:

ALFIN ROMADHON KABAN
198510022



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA
KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**ALFIN ROMADHON KABAN
198510022**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa
Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi
Riau
NAMA : Alfin Romadhon Kaban
NPM : 198510022
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

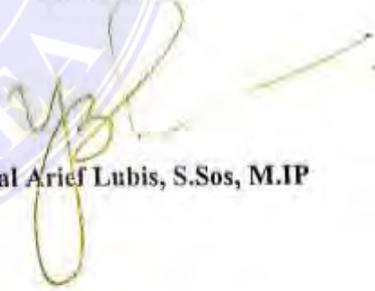
Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Dr. Nur Wulandari, S.ST, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,
Yang Menyatakan



Alfin Romadhon Kaban
198510022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Romadhon Kaban
NPM : 198510022
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.

Beserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



Alfin Romadhon Kaban

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Desa Bagan Batu Barat menjadi salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, desa ini terdiri dari tiga dusun antara lain, dusun simpang martabak, dusun kampung lalang dan dusun sukarukun dengan luas wilayah \pm 353,2 Ha. Dalam penelitian ini bahwa penerapan Penyaluran Dana Desa dilihat menggunakan teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Penyaluran Dana Desa di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau, hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa bagan batu barat belum cukup maksimal dalam penerapannya merujuk pada kebijakan pemerintah desa dengan melihat bagaimana komunikasi pemerintah desa terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan menunjuk sumber daya manusia atau aparatur desa sebagai implementator desa di desa bagan batu barat yang sudah memiliki karakteristik dan kinerja yang mencukupi dengan birokrasi aparatur desa yang cukup relevan, terutama dalam implementasi penyaluran dana desa.

Kata Kunci : Implementasi, Desa Bagan Batu Barat, Dana Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE DISTRIBUTION OF FUNDS AT THE VILLAGE OFFICE OF BAGAN BATU BARAT DISTRICT OF BAGAN SINEMBAH RIAU PROVINCE

Bagan Batu Barat Village is one of several villages in Bagan Sinembah District, this village consists of three hamlets, including Simpang Martabak hamlet, Lalang village and Sukarukun hamlet with an area of + 353.2 hectares. In this research, the implementation of Village Fund Distribution is seen using Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative type of methodology which uses interview, observation and documentation techniques. As reinforcement, this research also consists of key informants, main informants and additional informants, the aim of this research is to determine the Implementation of Village Fund Distribution in Bagan Batu Barat Village, Bagan Sinembah District, Riau Province, the results of this research are the Implementation of Village Fund Distribution carried out by the government Bagan Batu Barat village has not been optimal enough in its implementation referring to the village government policy by looking at how the village government communicates with the regional government and central government and appointing human resources or village officials as village implementers in Bagan Batu Barat village who already have sufficient characteristics and performance. with village apparatus bureaucracy which is quite relevant, especially in the implementation of village fund distribution.

Keywords: Implementation, Bagan Batu Barat Village, Village Fund

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sei Kebaro pada Tanggal 04 Desember 2001 dari Ayah Rajin Kaban dan Ibu Ami Narni Br. Pinem. Penulis merupakan putra ke dua dari Tiga bersaudara, Tahun 2019 penulis lulus dari SMK PEMBANGUNAN BAGAN BATU dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul dalam skripsi ini adalah “ **Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau** ”.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bimbingan, bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MAB selaku ketua yayasan Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini

7. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
9. Ibu Ami Nami Br. Pinem Selaku ibu dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
10. Bapak Rajin Kaban Selaku ayah dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
11. Teman-teman Universitas Medan Area yang sudah telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa tugas pembuatan skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Penulis



Alfin Romadhon Kaban

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Implementasi Kebijakan	7
A. Pengertian Implementasi Kebijakan	7
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan....	10
2.2 Desa	12
A. Pengertian Desa	12
B. Ciri-Ciri Umum Dan Karakteristik Desa	14
2.3 Dana Desa	15
A. Pengertian Dana Desa.....	15
B. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
C. Tujuan Dana Desa.....	17
D. Manfaat Dana Desa.....	18
2.4 Kerangka Berfikir	19
A. Regulasi	21
B. Faktor Penghambat	21
2.5 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24

3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Informan Penelitian.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik Analisis Data	28
3.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	31
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	31
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	31
4.1.2 Keadaan Demografis (Kependudukan)	33
4.1.3 Stuktur Organisasi	35
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	36
4.2 Hasil Penelitian	40
4.3 Pembahasan Penelitian Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.....	44
4.3.1 Indikator Komunikasi.....	44
4.3.2 Indikator Sumber Daya	49
4.3.3 Indikator Disposisi	51
4.3.4 Indikator Struktur Birokrasi	53
4.4 Faktor Penghambat Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	30
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat Menurut Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Penduduk Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat Menurut Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.3 Daftar Jumlah Kepala Keluarga Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat Menurut Dusun	40
Tabel 4.4 Daftar Jumlah Penduduk Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat Menurut Agama.....	41
Tabel 4.5 Daftar Jumlah Perangkat Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat....	41
Tabel 4.6 Daftar Jumlah Pembinaan RT/RW Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat	42
Tabel 4.7 Daftar Jumlah Lembaga Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat.....	42
Tabel 4.8 Daftar Jumlah Bidang Keamanan Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	20
Gambar 4.1 Kantor Desa/Kelurahan Bagan Batu Barat	32
Gambar 4.2 Data Peta Hasil Delineasi Kecamatan Bagan Sinembah.....	32
Gambar 4.3 Susunan Struktur Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	62
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	63
Lampiran 3 Surat Riset Lapangan.....	66
Lampiran 4 Surat Balasan Riset Dari Desa.....	67
Lampiran 5 Hasil Observasi.....	68
Lampiran 6 Hasil Wawancara.....	69
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan terendah yang memiliki kawasan wilayah yang kecil maupun penduduk yang sedikit sehingga pemerintahan dapat langsung berdampingan dan melayani masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dapat berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah desa merupakan unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh untuk mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, aman, tentram dan damai. (Sugiman, 2018: 83). Dalam hal ini, pemerintah desa harus sesuai dengan tujuan, yaitu dapat membentuk pemerintahan yang bijak, professional, efektif, efisien, serta selalu terbuka dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan segala urusan yang sudah telah ditetapkan pemerintahan Negara Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan anggaran Dana Desa (DD) menjadi fokus utama dalam pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Desa diberikan hak atas kewenangan untuk mengurus maupun mengatur kebutuhan desa dan prioritas desa. Oleh sebab itu berarti Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai

keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Dana Desa tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima oleh pihak desa dan dapat diupayakan maupun dikelola untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan segala keperluan desa baik dari perangkat-perangkat desa maupun lain-lain.

Desa diberikan hak terhadap kewenangan dan sumber daya keuangan yang sesuai atau memadai agar dapat mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah pusat menyisihkan dana desa yang cukup banyak untuk dibagikan kepada desa. Pada tahun 2015 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan alokasi rata-rata per desa sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa ditingkatkan sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-rata Rp628 juta per desa dan pada tahun 2017 ditingkatkan lagi sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata Rp800 juta per desa. (Lukman, Arsyad, Peribadi, 2022: 34)

Dalam pembagian Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemberdayaan masyarakat, yaitu 30% dari jumlah Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD, 70% dari jumlah Dana Desa yang diterima desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Wibowo, 2017: 314). Maka dari itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga termasuk berupa pembangunan fisik sarana dan prasana desa meliputi: prasarana

perhubungan diantaranya pembuatan jembatan, gorong-gorong, pembuatan jalan di dalam gang-gang dan sebagainya. Desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi didalam desa tersebut.

Penggunaan Dana Desa sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat asas yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan desa bisa menjadi anjuran pedoman terhadap pengelolaan keuangan desa karena isi didalamnya terdapat berbagai aturan aturan atau prosedur yang mencakup pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban. Pengelolaan Dana Desa diharapkan bisa berjalan secara efektif yang dapat menunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Pembangunan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mampu mengurangi kemiskinan-kemiskinan yang ada.

Proses penyaluran dana desa terhadap pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan desa dan desa yang baru dalam pemekaran agar bisa cepat tersalurkan dana desa tersebut. Sementara itu, dana desa bisa dapat digunakan untuk keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan desa tersebut. Berdasarkan pengamatan awal yang sudah dilakukan di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau, terdapat beberapa masalah yang dijumpai pada bagian Dana Desa, yaitu tidak ada nya proses penyaluran dana

desa, dikarenakan belum terealisasinya dana desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat sehingga tidak adanya pembangunan baik dari segi infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Apalagi desa tersebut masih dibidang dalam pemekaran yang dimulai pada tahun 2019 dan harus perlu adanya penyaluran dana desa tersebut untuk pengembangan desa.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka menjadi hal yang menarik untuk dikaji dengan maksud untuk mengetahui kenapa dana desa tersebut belum tersalurkan di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Maka dari itu; akan dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
2. Apa faktor penghambat implementasi penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis factor penghambat implementasi penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya adalah kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Instansi pemerintahan dan pemecahan permasalahan khususnya tentang Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau, dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

A. Bagi mahasiswa atau peneliti, penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis diantaranya :

1. Ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.
2. Sebagai bentuk dari perwujudan perguruan tinggi.
3. Sebagai bentuk pembelajaran dan pengevaluasikan terhadap ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung, dan menjadi syarat kepada mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area untuk menempuh gelar Strata Satu (S1).

B. Bagi Instansi Pemerintahan Desa, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mempercepat proses penyaluran dana desa dan bisa mulai mengembangkan desa yang baru dalam pemekaran di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Povinsi Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara Etimologis, Pengertian Implementasi menurut *Kamus Webster* Berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to Implement*. Dalam kamus tersebut, *to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan akibat/dampak terhadap sesuatu). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam segi ilmu politik definisi implementasi mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka pengertian implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki dampak atau efek pada sesuatu.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencakup tujuannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab: 1991) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dibangun, apa yang menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah disetujuinya arahan kebijakan publik, termasuk upaya-upaya untuk kebijakan itu. manajemen serta memiliki pengaruh atau dampak aktual pada masyarakat atau peristiwa. Menurut Meter dan Horn dalam (Agustino, 2006: 139) Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi publik atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok yang diarahkan

pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Rifley dan Franklin (1982) dalam Sulila (2015) mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas kebijakan, program, keuntungan (*benefit*) atau sejenis keluaran yang bersifat nyata (*tangible output*). Implementasi kebijakan publik pada hakekatnya adalah suatu ukuran tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka demikian itu untuk mengimplementasikan kebijakan menurut Bernadine R. Widjaya dan Susilo Suprado dalam Sulila (2015) menyatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek (Sulila, 2015: 43). Sedangkan Menurut William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994), menjelaskan bahwa keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. (Magdalena, Kusuma, Utomo, 2013: 607).

Dalam hal ini Wahab (2002: 59) menjelaskan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Grindle (1980) dalam (Wirasakti, 2008: 31) menyatakan implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pandangan lain menurut Edwards III (1980) implementasi kebijakan adalah adalah suatu proses yang bersifat krusial

karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan dengan baik implementasinya maka tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai. Edwards menyebutkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai 4 (empat) indikator yang sangat penting dan saling berhubungan, yaitu :

1. Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya dapat membantu implementor dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi merupakan karakteristik dan watak yang ada dalam implementor. Jika implementor mempunyai disposisi yang baik maka kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari kebijakan.
4. Struktur Birokrasi merupakan susunan dari komponen (unit-unit) kerja dalam suatu organisasi yang adanya pembagian kerja dan fungsi dari kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Struktur birokrasi menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. (Rozandi & Digdowiseiso, 2021: 46).

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997), untuk menjalankan implementasi kebijakan secara tepat dan sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana.
2. Tersedia waktu dan sumber daya.
3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan.
4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.
9. komunikasi dan koordinasi yang baik.
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (1994) Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan tergantung pada kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, sifat manfaat yang akan dihasilkan, tingkat perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia. Konteks implementasi mengacu pada kekuatan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik kelembagaan dan penguasa dan kepatuhan, serta tanggung jawab pelaksana. (Magdalena, Kusuma, Utomo, 2013: 608).

Teori dari Van Meter dan Van Horn dalam buku (Subarsono, 2005) memiliki 6 faktor penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan, diantaranya:

- a. Standar Kebijakan dan Sasaran Program yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, dan dalam bentuk nyata dan tidak berwujud, harus terukur dan jelas, yang secara jelas mempromosikan tujuan kebijakan yang dapat dicapai.
- b. Sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan proses implementasi kebijakan publik.
- c. Komunikasi, ialah komunikasi dengan siapa saja yang bertanggung jawab atas kebijakan program, didukung dengan komunikasi dengan instansi atau organisasi lain.
- d. Karakteristik ialah dari para agen unit atau sub unit ialah karakteristik atau sifat yang diperlihatkan baik penanggung jawab kebijakan maupun para pelaksana yang terlibat terhadap implementasi kebijakan.
- e. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang menawarkan bentuk dukungan, karakteristik para peserta/partisipan, ataupun juga tanggapan dan reaksi sifat opini dari publik.
- f. Sikap atau disposisi, sikap atau disposisi yang diperlihatkan oleh para implementor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kepada masyarakat.

2.2 Desa

A. Pengertian Desa

Secara etimologis, desa berasal dari kata Sanskerta yaitu *Deca* Itu berarti kampung halaman, kampung halaman, atau negara kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa merupakan kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa), atau desa merupakan kumpulan rumah yang membentuk satu kesatuan di luar kota. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyebutkan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2003: 3) sebagaimana dalam (Wiliyanto, 2015: 13).

Desa muncul atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang menetap secara permanen, dengan memperhatikan asal usul lokal dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat yang akhirnya membentuk desa persawahan. Desa merupakan kesatuan wilayah yang didiami oleh banyak keluarga yang bermukim dengan harapan dapat mempertahankan kehidupan dan mengandalkan sumber daya alam di sekitarnya untuk mencapai kesejahteraan. (sugiman, 2018: 84). Desa berada pada satuan pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota. Desa tidak sama dengan kecamatan yang berada di bawah kendali kecamatan.

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa :

(1) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

(2) “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa”.

Dalam pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 2 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lain lain asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabuapten/Kota.
6. Hibah dari sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

B. Ciri-Ciri Umum dan Karakteristik Desa

Ciri-ciri umum desa berdasarkan menurut Wiradi dalam Wasistiono (2006) sebagaimana dikutip dalam (Sudimun, 2017: 13) sebagai berikut :

1. Desa pada umumnya ialah pusat wilayah tani (dilihat dari sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat desa.
4. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri, tidak seperti kota yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

Karakteristik Desa menurut Roucek dan Warren dalam Wasistiono (2016) sebagaimana dikutip dalam (Sudimun, 2017: 13) sebagai berikut:

1. Besarnya kelompok primer.
2. Faktor geografi yang menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi.
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet.
4. Mobilitas sosial rendah.

5. Homogen.
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.
7. Populasi anak dalam proporsi yang besar.

2.3 Dana Desa

A. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di kirim/transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat (PMK No. 50 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 6). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, efektif, ekonomis serta bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, dimana pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap Tahun (PP No 40 Tahun 2014 Pasal 1- 2). Pengalokasian Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa”(PMK No 50 Tahun 2017 Pasal 66 Ayat 1).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 5 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan :

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperlihatkan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis”.

Oleh sebab itu, Salah satu yang menjadi aspek kunci terhadap terjadinya dana desa ialah penyaluran dana desa yang diberikan APBN kepada pemerintah desa. Meskipun dana desa merupakan hak atas pemerintah desa, tetapi penyaluran dana desa dalam pelaksanaannya selalu melibatkan peran maupun fungsi pemerintah setempat sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi maupun akuntabilitas serta untuk menjamin penggunaan dana desa, maka proses penyaluran dana desa mengikutsertakan pemerintah desa sebagai pengguna dana desa dan pemerintah desa bertemu lebih dulu kabupaten/kota. (Indrawati, 2017: 37) sebagaimana dikutip dalam (Muliawan, Sasmito, Gunawan, 2019: 101).

B. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. **Transparan** Yakni asas yang memperlihatkan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, dan tidak diskriminatif setiap tahapnya tentang pengelolaan keuangan desa, baik dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
2. **Akuntabel** yaitu asas yang menentukan bahwa setiap melakukan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka

pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sebagai pemberi kekuasaan pemerintahan desa.

3. Partisipatif ialah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya perangkat desa yang bertanggung jawab, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan juga dikelola secara berkelanjutan.

C. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari dialirkannya Dana Desa menurut Santiasih (2017) dalam (Ardila, 2020: 37) sebagai berikut:

1. Dana desa memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
2. Dengan adanya dana desa maka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.
3. Dapat mengurangi atau menanggulangi kemiskinan di Desa.
4. Infrastruktur desa yang masih rendah, maka dengan adanya Dana Desa dapat ditingkatkan pembangunan dan infrastruktur yang ada di desa.

Dalam hal ini, tujuan dari dana desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa, mengurangi kemiskinan yang ada di desa, memajukan/meningkatkan perekonomian yang ada di desa, mengatasi ketimpangan antar desa, dan dengan

adanya dana desa akan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan yang ada didesa.

D. Manfaat Dana Desa

Menurut Santiasih (2017) sebagaimana dikutip dalam (Ardila, 2020: 37-38) manfaat dari adanya dialirkannya Dana Desa sebagai berikut :

1. Masyarakat desa agar dapat berkembang lebih mudah dikarenakan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal ini sejalan atas keinginan masyarakat untuk dapat menerapkan prinsip partisipasi didalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk Dana Desa. Karena keputusan pemerintah desa ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa bisa menjadi lebih optimal. Hal ini karena pembangunan dilakukan sendiri (swadaya desa). Maka secara tidak langsung masyarakat turut serta mendukung terhadap kemajuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Partisipasi kota dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam dana desa dapat mengurangi kecurangan dalam penggunaan dana desa dengan pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah kota yang menjadi sasaran pembangunan.
4. Dana desa yang memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kapasitas desa.

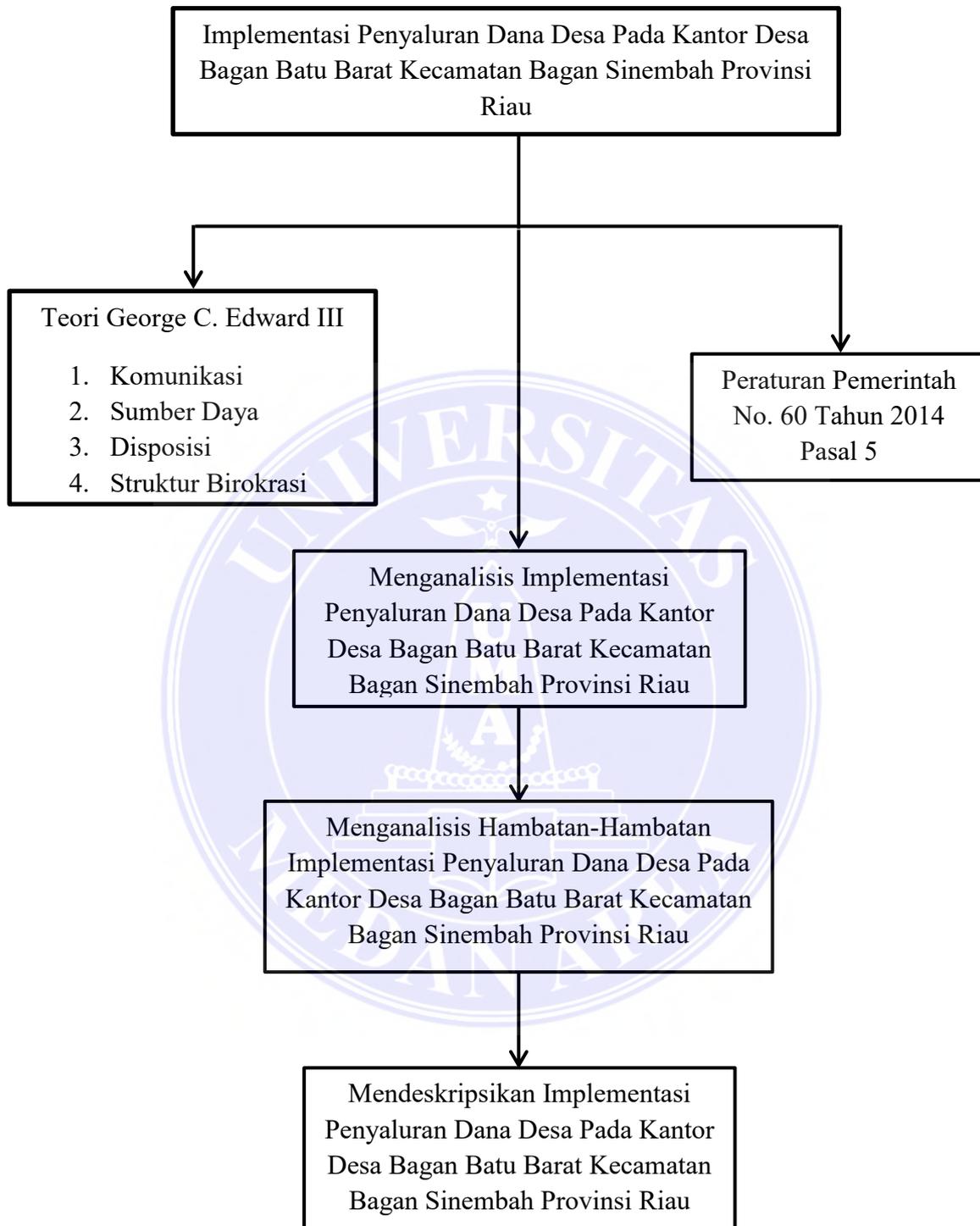
Maka manfaat dana desa dapat terlihat dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Kemandirian desa dapat dibuktikan dengan kebangkitannya dari desa yang semula sangat tertinggal menuju menjadi perkembangan, kemajuan dan pencapaian status desa mandiri. Hal tersebut juga dibarengi dengan desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan potensinya.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri sebagai bentuk dasar atau landasan dalam mengembangkan konsep dan teori yang digunakan untuk menjawab semua masalah-masalah yang berada dirumusan masalah dalam melakukan sebuah penelitian.

Adapun penelitian terkait tentang Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau tedapat masalah-masalah yang harus dilakukan dan diluruskan karena tidak sesuai dengan ketetapan yang berdasarkan kebutuhan penduduk sehingga untuk melihat masalah tersebut peneliti menggunakan teori George C. Edward III mengenai tentang teori implementasi kebijakan berdasarkan beberapa indikator. Melalui teori ini peneliti telah menemukan untuk melakukan apa yang harus diimplementasi dalam penyaluran dana desa dan peneliti juga akan mengungkapkan apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi penyaluran dana desa.

Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

A. Regulasi

Regulasi dalam penelitian penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 5 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan :

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis”.

B. Faktor Penghambat

Hambatan-hambatan dalam kerangka berfikir terhadap penelitian penulis yaitu:

1. Keterlambatan berkas pengajuan yang dilengkapi dengan program kerja sesuai kebutuhan.
2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu tentang judul ini. Diantaranya adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA / TAHUN	JUDUL	URAIAN	HASIL
I	II	III	IV	V
1	Cella Mita Yoky Ardila (2020)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Metode : Kualitatif • Teori : William N. Dunn. • T. Pengumpulan data : Wawancara dan observasi lapangan. • T. Analisis data : Deskriptif menggunakan Miles dan Huberman • Lokasi : Desa Pujon Kidul Kec. Pujon Kab. Malang. 	“Hasil kajian menunjukkan efektifitas pengelolaan dana desa dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam tahap perencanaan untuk menjangring aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat”.
2	Misno (2015)	Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat).	<ul style="list-style-type: none"> • Metode : Kualitatif • Teori : Bogdan dan Taylor. • T. Pengumpulan data : Wawancara dan dokumentasi. • T. Analisis Data : Deskriptif. • Lokasi : Desa Blankahan Kec. Kuala Kab. Langkat. 	“Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian pula dengan desa Blankahan dengan ADD saat ini maka desa Blankahan sangat membantu untuk melakukan pembangunan desa secara setahap demi setahap untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Blankahan perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
I	II	III	IV	V
3	Reza Rejeki (2019)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode : Kualitatif • Teori : George C. Edward III • T. Pengumpulan Data : Analisis Dan Wawancara. • T. Analisis Data : Deskriptif • Lokasi : Desa Pokan Baru Kec. Hutabayu Kab. Simalungun. 	“Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun kurang baik. Kualitas sumberdaya manusia dari pegawai kantor kepala desa yang masih kurang baik dari segi pendidikan dan menguasai teknologi yang masih rendah sehingga pelaksanaan implementasi alokasi dana desa tidak optimal serta sumberdaya manusia dari masyarakat desa pokan baru yang masih kurang partisipasinya menyebabkan kurangnya tenaga

				kerja untuk melaksanakan pembangunan menjadi lambat. Disposisi pegawai kantor kepala desa pohan baru untuk bekerjasama masih kurang baik menyebabkan pelaksanaan implementasi menjadi lambat”.
4	Ali Ulumudin (2018)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Metode : Kualitatif • Teori : William N. Dunn • T. Pengumpulan data : Analisis dan Wawancara • T. Analisis Data : Miles dan Huberman dengan pendekatan Deskriptif • Lokasi : Desa Puser Kec. Tirtayasa Kab. Serang 	“Program anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur. Anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, di dalam pengelolaan dana desa di desa puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolannya seperti di perencanaan ataupun dalam pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa di desa puser dan pendamping desa dirasa masih kurang memuaskan dan belum paham mengenai pemerintahan desa”.
I	II	III	IV	V
5	Dwi Agustin (2021)	Optimalisasi Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Desa Di Era Pandemi Di Kantor Perbendaharaan Negara Blitar	<ul style="list-style-type: none"> • Metode : Kualitatif • Teori: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. • T. Pengumpulan Data : Observasi dan Wawancara • T. Analisis Data : Pendekatan Deskriptif • Lokasi : Blitar 	“Dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa di era pandemic ini sudah berjalan optimal. Meskipun dalam melakukan penyaluran dana desa terdapat beberapa hambatan yang muncul, namun KPPN Blitar dapat mengatasinya serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi dan laporan realisasi penyaluran alokasi dana desa yang menunjukkan pagu maksimal 100%. Dan tidak menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan serta tindakan perbuatan manusia. Penelitian ini tidak berusaha menghitung data yang telah diperoleh secara statistik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memerikan penjelasan mengenai tentang Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu. penelitian yang pengumpulan datanya diprioritaskan berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh narasumber yang disebarluaskan dan diseleksi serta materinya dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada. dimenangkan dari lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dari Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.

3.2 Informan Penelitian

Teknik informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2010:300). Informan (Narasumber) penelitian adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal

dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, yaitu dipilih yang benar benar menguasai objek penelitian dan pertimbangan dengan tujuan tertentu. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang benar benar tau apa yang akan diharapkan untuk kedepannya, atau mungkin seorang penguasa, untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.(Sugiyono, 2012:54). Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219). Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling yaitu untuk mengumpulkan informasi yang benar-benar nyata atau faktual dengan cara mewawancarai seorang informan yang diyakini mengetahui atau menguasai suatu keterampilan atau pekerjaan dalam bidangnya. Maka dari itu teknik purposive sampling dan snowball sampling yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memudahkan pengolahan data untuk keperluan maupun kepentingan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan Dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Informan Kunci. Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang mengetahui informasi keseluruhan tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Informan Utama. Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah Orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.
3. Informan Tambahan. Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian”kualitatif.

Informan penelitian dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala Desa	Informan Kunci
2	Perangkat Desa	Informan Utama
3	Masyarakat	Informan Tambahan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, antara lain:

1. Observasi

Kemampuan mengamati seseorang melalui kerja panca indera mata dan indera lainnya. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah. Pertama, dilakukan observasi terhadap proses penyaluran dana desa dan kendala yang dihadapi, dilanjutkan dengan wawancara dengan narasumber yang

bertanggung jawab dalam pengajuan permohonan penyaluran dana desa. Dalam penelitian ini jenis observasi menggunakan observasi terstruktur atau terencana. Dalam observasi ini, peneliti yang mengumpulkan data secara langsung menginformasikan kepada informan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu dari sekian banyak teknik pengumpulan data, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan kepada narasumber atau responden yang dipilih. Maka yang diwawancarai yakni Kepala Desa Bagan Batu Barat, bagian Seksi desa, dan bagian aparatur-aparatur desa. Dalam mewawancarai peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti sudah mengetahui secara pasti tentang informasi yang diberi dari narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu peninjauan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Mengumpulkan data dan dokumentasi mengharuskan pihak lain untuk dapat mengakses atau memperolehnya. Salah satunya adalah dokumentasi yang peneliti terima selama observasi atau wawancara. Dokumentasi ini terdiri dari bahan pengamatan dan temuan dilapangan, serta bukti penelitian dari penelitian lapangan, yaitu. dokumentasi hasil proses wawancara terhadap responden terpilih.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang berdasarkan pada adanya hubungan sistematis antar variable yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sedang dilakukan dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti juga sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan makna hubungan tiap variable-variabel penelitian sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan oleh peneliti.

Dalam penggunaan teknik analisis data yang biasa dipergunakan para peneliti adalah metode analisis data tipe interaktif, bisa dilakukan dengan cara :

1. Reduksi data (*data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggabungkan dan mengklasifikasikan hal-hal yang penting, berfokus pada hal-hal yang penting dan memilih apa yang benar-benar diperlukan dari informasi tersebut. Reduksi data dalam penelitian ini terdiri dari menemukan pokok-pokok dan merangkum informasi atau data dari observasi dan wawancara yang sesuai dengan topik pembahasan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah Kegiatan dalam mengumpulkan pengumpulan data yang memungkinkan untuk menyimpulkan tentang penelitian. Maka dari itu, ketika penyajian data biasanya dalam bentuk deskripsi singkat, hubungan antar kategori, bagan atau diagram, flowchart, dan lain lain. Oleh sebab itu, Semua penyajian tersebut dirancang dengan cara yang jelas dan

menarik, sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan berupa gambaran atau uraian deskripsi penyaluran dana desa.

3. Penarikan kesimpulan

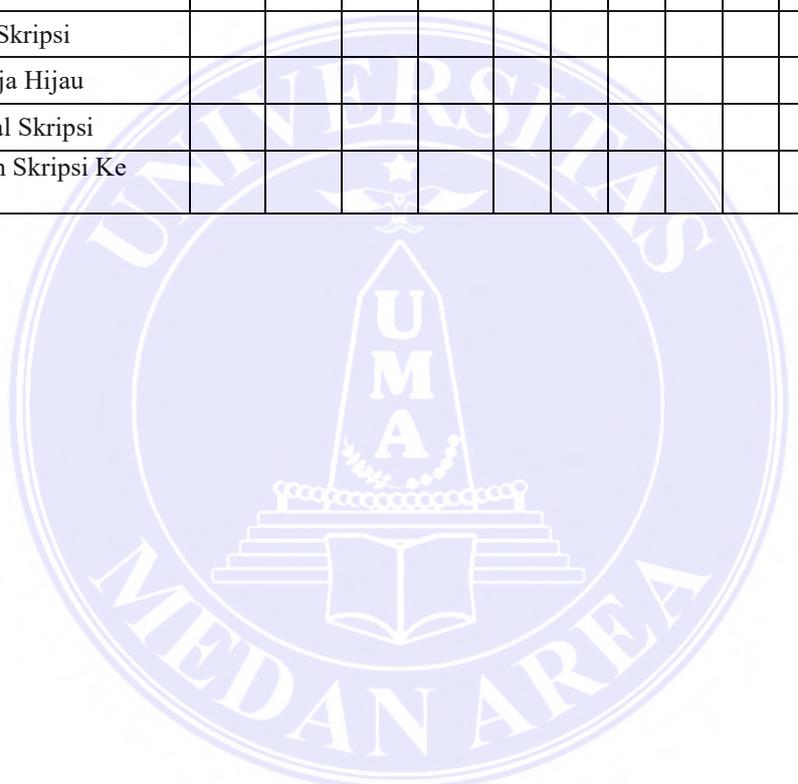
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap data-data yang sudah dimiliki, keputusan tersebut dilakukan secara jelas dan teliti, serta terdapat petunjuk untuk menguji keakuratan makna informasi tersebut, sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi kokoh dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan apa hambatan yang terjadi terhadap penyaluran dana desa pada kantor desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau sehingga belum adanya penyaluran dana desa.

3.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun lokasi ini dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian mengingat lokasi ini merupakan tempat tinggal peneliti secara tidak langsung peneliti cukup kenal dengan wilayah ini sehingga di harapkan hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat setempat.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2022				2023								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■	■	■									
3	Seminar Proposal				■									
4	Perbaikan Proposal					■	■							
5	Penelitian					■		■	■					
6	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■		
7	Seminar Hasil											■		
8	Perbaikan Skripsi											■	■	
9	Sidang Meja Hijau											■	■	■
10	Revisi Final Skripsi												■	■
11	Penyerahan Skripsi Ke Prodi													■



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran dengan judul Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi, mengemukakan :

1. Implementasi Penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bagan Batu Barat belum cukup maksimal dalam penerapannya merujuk pada kebijakan pemerintah desa dengan melihat bagaimana komunikasi pemerintah desa terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan menunjuk sumber daya manusia atau aparatur desa sebagai implementator desa di Desa Bagan Batu Barat yang memiliki karakteristik dan kinerja yang mencukupi dengan birokrasi aparatur desa yang cukup relevan disetiap bidangnya dan memiliki tupoksi masing-masing terutama dalam implementasi penyaluran dana desa, sehingga dalam pelaksanaan implementasi penyaluran dana desa masih gagal terhadap penyaluran dana desa untuk Desa Bagan Batu Barat dikarenakan desa tersebut masih status desa persiapan.
2. Faktor penghambat Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau memiliki hambatan dalam indikator struktur birokrasi implementasi kebijakan dikarenakan belum adanya register desa yang diberikan oleh pemerintah pusat

untuk Desa Bagan Batu Barat sebagai calon penerima dana desa. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi penyaluran dana desa terdapat pada desa yang masih dalam status desa persiapan dan juga dokumen atau berkas-berkas yang diberikan pemerintah desa Bagan Batu Barat kepada pemerintah daerah untuk dikirim ke pemerintah pusat namun menjadi keterlambatan sehingga berkas maupun dokumen yang diperlukan untuk penyaluran dana desa memiliki kendala seperti lamanya pengiriman berkas yang kemungkinan disebabkan oleh pemerintah daerah.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau disarankan untuk lebih memonitoring perkembangan pemberkasan akan penyaluran dana desa yang sulit dicairkan oleh pemerintah pusat untuk Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.
2. BPD disarankan untuk dibentuk tim sebagai persiapan untuk rancangan perdes terhadap penggunaan dana desa agar dana desa dikelola dengan baik ketika dana desa sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Edwards, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sulila. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara. Jakarta.

Artikel Ilmiah (Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi)

- Ardila, Cella Mita Yoky. 2020. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Hasibuan, Y.A., Sinaga, R.S., Adam. 2022. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Perspektif 11 (2): 397.
- Lubis, Disa D.R.A., Kadir, A., Lubis, Yurial A. 2022. *Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan 1 (2): 5.
- Lukman., Arsyad, M., Peribadi. *Implementasi Penyaluran Dana Desa Dan Problematikannya (Studi Di Desa Kafofoo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna)*. Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan 4 (1): 34.
- Magdalena, B., Kusuma, A.R., Utomo, H.S. 2013. *Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrative Reform 1 (3): 607.
- Muliawan, I., Sasmito, C., Gunawan, C. I. 2019. *Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmu Administrasi 16 (1): 101.
- Rozandi, M. dan Digdowiseiso, K. 2021. *Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)*. Jurnal Sosial dan Humaniora 6 (1): 45-46.
- Sudimun. 2017. *Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik*. Skripsi Universitas Terbuka.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum 7(1): 83-84.
- Wibowo, G. A. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota 13(3): 314.

Wiliyanto, T. 2015. *Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Wirasakti, D. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.

Perundang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 pasal 7 ayat 1 Tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (6).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 pasal 13 ayat (2-7)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 pasal 23 ayat (5-6)

Peraturan Menteri Keuangan No.205 Tahun 2019 pasal 25 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019 Pasal 26 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2014 Pasal 1- 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN 1
PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA
BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
PROVINSI RIAU

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi :
Lokasi :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Brosur/ Flyer Instansi			
2	Struktur Organisasi			
3	SOP			
4	Sikap Pegawai			
5	Dokumen Arsip			
6	Program Kerja			
7	Website Instansi			
8	Sosial Media Instansi			
9	Agenda Kegiatan/Program			
10	Laporan Kegiatan/ Program			
11	Bentuk Kegiatan/Program			
12	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Ruang Arsip			

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Kepala Desa/Perangkat Desa

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Agama :
4. Jenis Kelamin :
5. Umur :
6. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan Penelitian

Komunikasi

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan pemerintah desa terhadap penyaluran dana desa di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk memperoleh penyaluran dana desa di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
3. Apa yang dilakukan pemerintah desa disaat belum adanya Dana Desa untuk pengembangan desa di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
4. Apa yang menjadi penghambat terhadap penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?

Sumber Daya

5. Bagaimana sumber daya aparatur aparatur desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
6. Bagaimana tingkat kemampuan kinerja perangkat desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Disposisi

7. Bagaimana karakter atau watak perangkat desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Struktur Birokrasi

8. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Masyarakat

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Agama :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan Penelitian

Komunikasi

1. Apa yang masyarakat ketahui tentang dana desa di desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemerintah desa jika di Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau belum adanya dana desa?
3. Apa yang masyarakat ketahui tentang penghambat yang terjadi terhadap penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?

Sumber Daya

4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sumber daya aparatur aparatur desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Disposisi

5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai karakter atau watak perangkat desa di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Struktur Birokrasi

6. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang struktur birokrasi yang ada di Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?



LAMPIRAN 3

SURAT RISET LAPANGAN

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 217/FIS.1/01.10/IV/2023	13 Februari 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	

Yth,
**Kepala Desa Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama	: Alfin Romadhon Kaban
N P M	: 198510022
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah, dengan judul Skripsi **"Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



LAMPIRAN 4

SURAT BALASAN RISET DARI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KEPENGHULUAN BAGAN BATU BARAT
Jl. Jend. Sudirman Dsn. Simpang Martabak Bagan Batu Barat

Nomor : 01 /SK/BBB/III/2023
Perihal : **Balasan Pengambilan Data/Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan
Universitas Medan Area
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara bapak/ibu pada tanggal 13 Maret 2023 perihal Pengambilan Data/Riset dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Alfin Romadhon Kaban
N P M : 198510022
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Selanjutnya kami jelaskan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dan telah melakukan pengambilan Data/Riset dengan judul skripsi "**Implementasi Penyaluran Dana Desa Pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**" dengan nilai yang **SANGAT MEMUASKAN**

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

PJ PENGHULU BAGAN BATU BARAT


* KEMERDEKAAN *
MARKIS
19770510 200710 1 002

LAMPIRAN 5 HASIL OBSERVASI

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Desa/Kepenghuluan Bagan Batu Barat
Lokasi : Jl. Lintas Riau - Sumut Simpang Martabak RT 01 RW 01

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Brosur/ Flyer Instansi	√		Ada
2	Struktur Organisasi	√		Ada
3	SOP	√		Ada
4	Sikap Pegawai	√		Baik
5	Dokumen Arsip	√		Ada
6	Program Kerja	√		Ada
7	Website Instansi		√	Tidak Ada
8	Sosial Media Instansi		√	Tidak Ada
9	Agenda Kegiatan/Program	√		Ada
10	Laporan Kegiatan/ Program	√		Ada
11	Bentuk Kegiatan/Program	√		Ada
12	Sarana Prasarana f. Ruang Kerja g. Ruang Tunggu h. Parkir i. Toilet j. Ruang Arsip	√		Ada

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Kepala Desa

A. Identitas Responden

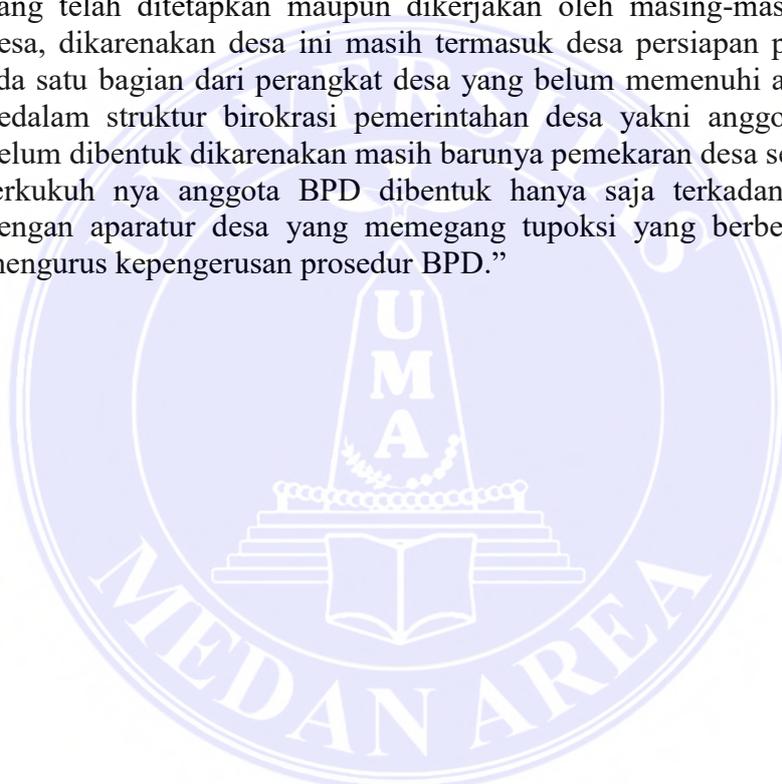
1. Nama : Markis, SE
2. Jabatan : Kepala Desa
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Umur : 45 Tahun
6. Pendidikan Terakhir : Strata-1

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana indikator komunikasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “Mengenai hal dana desa di Desa Bagan Batu Barat ini masih belum ada dana desa nya dikarenakan di desa ini masih belum punya register desa maka dari itu pembangunan-pembangunan dan lain-lain untuk keperluan desa maupun pengembangan desa yang menggunakan dana desa masih belum bisa dilakukan, dan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk dana desa didesa ini yaitu seperti nama desa bagan batu barat sudah terdaftar di kabupaten rokan hilir namun belum terdaftar di kementerian dalam negeri maka dari hal tersebutlah belum ada dana desa di desa bagan batu barat ini. Untuk masalah hambatan kemungkinan keterlambatan dari pemerintah kabupaten karena dokumen yang menyangkut untuk dana desa di desa ini sudah lengkap dan kartu keluarga sudah mencukupi sebagai penerima dana desa di desa ini.”
2. Bagaimana indikator sumber daya terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
Jawaban : “sumber daya aparatur di desa ini sudah cukup bagus tetapi ada beberapa faktor yang mengurangi turunnya sumber daya aparatur di Kantor Desa Bagan Batu Barat salah satunya belum di bentuknya anggota BPD di desa ini sehingga diperlukannya peningkatan sumber daya aparatur desa dengan cara membentuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa ini.”
3. Bagaimana indikator disposisi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Jawaban : “dari yang saya lihat sikap para aparatur-aparatur di desa bagan batu barat sudah cukup baik dan disini saya menganjurkan ke perangkat desa lebih komitmen terhadap penyaluran dana desa ini, baik dari dokumen yang diperlukan mengenai dana desa ini buat merekomendasikan desa bagan batu barat ke pemerintah pusat seperti dokumen mengenai batasan desa dan mengenai dokumen kartu keluarga penduduk desa yang sudah mencukupi sebagai syarat keluarnya kode desa untuk mendapatkan dana desa.”

4. Bagaimana indikator struktur birokrasi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : ”berbicara mengenai struktur birokrasi pemerintahan desa ini sudah hampir tersusun disetiap bagian aparatur nya dan memiliki tupoksi yang telah ditetapkan maupun dikerjakan oleh masing-masing perangkat desa, dikarenakan desa ini masih termasuk desa persiapan pastinya masih ada satu bagian dari perangkat desa yang belum memenuhi atau memasuki kedalam struktur birokrasi pemerintahan desa yakni anggota BPD yang belum dibentuk dikarenakan masih barunya pemekaran desa sehingga belum terkukuh nya anggota BPD dibentuk hanya saja terkadang masih diisi dengan aparatur desa yang memegang tupoksi yang berbeda bersamaan mengurus kepengerusan prosedur BPD.”



IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Perangkat Desa

A. Identitas Responden

1. Nama : Delima Panjaitan S, ST
2. Jabatan : Kasi Pelayanan
3. Agama : Kristen
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Umur : 39 Tahun
6. Pendidikan Terakhir : Strata-1

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana indikator komunikasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : "Dana desa di desa ini masih tidak ada disebabkan karena belum adanya register desa, namun ada pihak ketiga yang membantu untuk mengembangkan desa bagan batu barat seperti dari perusahaan PTPN yang beroperasi di bidang minyak kelapa sawit karena perusahaan tersebut termasuk kedalam lingkungan desa bagan batu barat, sehingga dana yang diberikan perusahaan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan desa seperti pembangunan jalan maupun keperluan perangkat desa dan lainnya."
2. Bagaimana indikator sumber daya terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
Jawaban : "saya rasa sumber daya dari kinerja aparatur-aparatur di Desa Bagan Batu Barat ini sudah cukup mampu dalam mengerjakan tugasnya masing-masing dan juga ada rasa saling membantu setiap aparatur-aparatur desa ketika ada yang lagi kesulitan dalam mengerjakan tugasnya baik dari yang tidak mengerti mengerjain tugasnya maupun ketika lagi banyak tugas yang dikerjakan."
3. Bagaimana indikator disposisi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : "menurut tanggapan saya sikap dan kinerja para aparatur sudah cukup bagus karena setiap arahan yang diberikan baik dari kepala desa maupun juga dari perangkat desa selalu dikerjakan dengan baik dan disini kami lebih di fokuskan terhadap penyaluran dana desa yang belum dimiliki desa bagan batu barat ini sejak desa ini baru dimekarkan pada tahun 2014."
4. Bagaimana indikator struktur birokrasi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : "struktur birokrasi di desa bagan batu barat ini setiap perangkat desa sudah tersusun bagian bagian nya dan sudah ada jabatannya masing

masing maka dari itu setiap para aparatur desa sudah diberikan tupoksi nya masing masing yang akan dikerjakan tetapi masih ada hal yang belum terpenuhi dalam struktur birokrasi seperti tidak adanya anggota BPD dalam desa bagan batu barat ini”



IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Perangkat Desa

A. Identitas Responden

1. Nama : Abdul Muin
2. Jabatan : Kasi Pemerintahan
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Umur : 50 Tahun
6. Pendidikan Terakhir : Diploma-2

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana indikator komunikasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “Kami dari pemerintah Desa Bagan Batu Barat selalu berjuang untuk dana desa di desa ini sehingga bisa cepat terlaksananya pembangunan-pembangunan di desa ini, sudah banyak aparatur-aparatur desa yang dikirim untuk ke kantor pusat di Jakarta untuk mendapatkan register di Desa Bagan Batu Barat ini namun belum ada respon kelanjutan dari pemerintah pusat mengenai perihal dana desa ini.”
2. Bagaimana indikator sumber daya terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
Jawaban : “menurut saya sumber daya yang ada di Desa Bagan Batu Barat ini sudah cukup baik walaupun masih ada kekurangan seperti tidak adanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) namun dalam kinerja pegawai sudah cukup mampu dalam menjalankan tugasnya masing masing.”
3. Bagaimana indikator disposisi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “sikap maupun karakter yang saya lihat dari setiap semua aparatur-aparatur di desa bagan batu barat ini sudah cukup baik karena arahan arahan yang diberikan kepada setiap aparatur pastinya selalu dikerjakan dengan baik dan juga ada rasa saling membantu apabila ada arahan maupun kerjaan yang diberikan kepada perangkat desa. Dan disini perangkat desa diarahkan untuk lebih komitmen terhadap proposal mengenai penyaluran dana desa untuk dikirim ke kantor pusat pemerintahan untuk mendapatkan kode register desa dan juga agar desa ini diakui oleh pemerintah pusat atau juga diakui oleh Negara.”
4. Bagaimana indikator struktur birokrasi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Jawaban : ”mengenai bagaimana kelengkapan tersusunnya sesuatu manajemen pada perangkat desa harus terpenuhinya atau terlengkapinya yang namanya struktur birokrasi, melihat struktur birokrasi di desa bagan batu barat ini masih berstatus desa persiapan sehingga masih hanya tersusun bagian-bagian perangkat desa nya dan sudah ada jabatannya masing masing maka dari itu setiap para aparatur desa sudah diberikan tupoksi nya masing masing yang akan dikerjakan tetapi masih ada hal yang belum terpenuhi dalam struktur birokrasi seperti tidak adanya anggota BPD dalam desa bagan batu barat ini”



IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Masyarakat

A. Identitas Responden

1. Nama : Raynhard Hutapea
2. Agama : Kristen
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Umur : 58 Tahun
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Pendidikan Terakhir : Strata-1

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana indikator komunikasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “Menurut sepengetahuan saya, kami sebagai masyarakat hanya mengetahui bahwa Desa Bagan Batu Barat ini belum ada dana desa nya di sebabkan tidak ada register desa sehingga untuk masalah yang lebih kedalamnya perihal tidak adanya dana desa jawaban saya tidak tahu karna yang mengetahui itu hanya perangkat desa bagan batu barat”
2. Bagaimana indikator sumber daya terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
Jawaban : “menurut saya sumber daya di Desa Bagan Batu Barat baik dari aparaturnya sudah bagus, baik dari kinerja para aparaturnya desa dilaksanakan dengan baik dan mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Namun masih ada keuangan di desa bagan batu barat seperti belum dibentuknya keanggotaan BPD di desa bagan batu barat ini agar ada tempat aspirasi masyarakat mengenai keuangan di desa bagan batu barat ini ataupun aspirasi mengenai hal yang lain-lain untuk masyarakat.”
3. Bagaimana indikator disposisi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “sejauh yang saya lihat mengenai sikap maupun komitmen para aparaturnya untuk mendapatkan dana desa di desa bagan batu barat ini tetap terus berusaha semaksimal mungkin, sehingga keingintahuan masyarakat mengenai permasalahan mengapa di desa ini belum adanya dana desa untuk saat ini masih belum jelas sehingga menurut saya harus ada nya peningkatan kinerja akan bagaimana para aparaturnya desa dapat merealisasikan agar dana desa tersebut dapat dikeluarkan.”
4. Bagaimana indikator struktur birokrasi terhadap penyaluran dana desa pada kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Jawaban : “menurut saya struktur birokrasi di desa bagan batu barat ini sudah cukup baik walaupun desa ini masih dalam status desa persiapan tetapi tugas maupun kinerja mereka sesuai dengan jabatan mereka dan dikerjakan sudah mencukupi walaupun masih ada kekurangan yaitu belum adanya keanggotaan BPD”.



IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR DESA BAGAN BATU BARAT KECAMATAN BAGAN SINEMBAH PROVINSI RIAU

Masyarakat

A. Identitas Responden

1. Nama : Supriyanto
2. Agama : Islam
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Umur : 38 Tahun
5. Pekerjaan : Buruh
6. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana indikator komunikasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “Menurut sepengetahuan saya, kami sebagai masyarakat hanya mengetahui bahwa Desa Bagan Batu Barat ini belum ada dana desa nya di sebabkan tidak ada register desa sehingga untuk masalah yang lebih kedalamnya perihal tidak adanya dana desa jawaban saya tidak tahu karna yang mengetahui itu hanya perangkat desa bagan batu barat”
2. Bagaimana indikator sumber daya terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau?
Jawaban : “menurut saya sumber daya di Desa Bagan Batu Barat baik dari aparaturnya sudah bagus, baik dari kinerja para aparaturnya desa dilaksanakan dengan baik dan mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Namun masih ada keuangan di desa bagan batu barat seperti belum dibentuknya keanggotaan BPD di desa bagan batu barat ini agar ada tempat aspirasi masyarakat mengenai keuangan di desa bagan batu barat ini ataupun aspirasi mengenai hal yang lain-lain untuk masyarakat.”
3. Bagaimana indikator disposisi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?
Jawaban : “sejauh yang saya lihat mengenai sikap maupun komitmen para aparaturnya desa untuk mendapatkan dana desa di desa bagan batu barat ini tetap terus berusaha semaksimal mungkin, sehingga keingintahuan masyarakat mengenai permasalahan mengapa di desa ini belum adanya dana desa untuk saat ini masih belum jelas sehingga menurut saya harus ada nya peningkatan kinerja akan bagaimana para aparaturnya desa dapat merealisasikan agar dana desa tersebut dapat dikeluarkan.”
4. Bagaimana indikator struktur birokrasi terhadap penyaluran dana desa pada Kantor Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau ?

Jawaban : “menurut saya struktur birokrasi di desa bagan batu barat ini sudah cukup baik walaupun desa ini masih dalam status desa persiapan tetapi tugas maupun kinerja mereka sesuai dengan jabatan mereka dan dikerjakan sudah mencukupi walaupun masih ada kekurangan yaitu belum adanya keanggotaan BPD”.



LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Kepala Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Sebagai Informan Kunci

(Bapak Markis, SE)



Wawancara Bersama Perangkat Desa Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Sebagai Informan Utama



Bapak Abdul Muin



Ibu Delima Panjaitan S, ST

Wawancara Bersama Masyarakat Sebagai Informasi Tambahan



Bapak Raynhard Hutapea



Bapak Supriyanto

